

NASKAH PUBLIKASI

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB) SEBAGAI LANGKAH MITIGASI BENCANA DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Kasus: SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti)

Oleh:
AFISA
20160520090

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



Sakir Ridho Wijaya, S.IP., M.IP
NIK: 19891106201604 163 156

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

**EVALUASI PROGRAM SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB)
SEBAGAI LANGKAH MITIGASI BENCANA DI KOTA YOGYAKARTA
(Studi Kasus: SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti)**

Oleh

Afisa¹, Sakir²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

¹ Email: afsaputriangsa@gmail.com, ² mas.sakir@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sebagai Langkah Mitigasi Bencana di Kota Yogyakarta (*Studi Kasus: SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pada tahap *context* bisa dikategorikan baik dimana SD Negeri Baluwarti sudah memenuhi semua komponen mulai dari latar belakang program, tujuan program, struktur organisasi program, dan saran prasarana pelaksana program. Tetapi SD Negeri Bangunrejo 1 belum mempunyai struktur organisasi program. (2) Pada tahap *input* bisa dikategorikan cukup dimana dari empat komponen, SD Negeri Baluwarti hanya belum mempunyai peraturan khusus terkait program dan SD Negeri Bangunrejo 1 juga belum mempunyai peraturan dan kurikulum khusus terkait program. (3) Pada tahap *process* sudah berjalan dengan baik dimana program SSB masih berjalan, hanya saja SD Negeri Bangunrejo 1 lebih memfokuskan pada pembelajaran di kelas tanpa adanya simulasi sedangkan SD Negeri Baluwarti tetap melaksanakan simulasi minimal setahun sekali. (4) Pada aspek *product* sudah sesuai tujuan program SSB yaitu meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah terhadap bencana.

Kata kunci: evaluasi program, mitigasi bencana, Sekolah Siaga Bencana (SSB)

1. Pendahuluan

Bencana alam selalu menjadi hal yang mengancam bagi kehidupan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Kejadian ini bisa terjadi dimanapun tanpa mengenal waktu, tempat, bahkan korbannya. Indonesia termasuk salah satu negara yang rawan terjadi bencana alam. Sepanjang tahun 2009-2019, Data dan Informasi Bencana Indonesia

BNPb mencatat bahwa DIY telah mengalami 522 kali bencana alam dimana bencana yang sering terjadi yaitu tanah longsor (129 kejadian) dan puting beliung (250 kejadian) dengan dampak yang cukup parah mulai dari korban jiwa sampai kerusakan infrastruktur (BNPb, 2019)

Kota Yogyakarta masuk dalam zona merah sebagai daerah yang rawan mengalami bencana alam di DIY dimana potensi bencana alam yang melanda Kota Yogyakarta sepanjang 5 tahun terakhir pada tahun 2015-2019 yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung/angin kencang. Pasal 44 huruf c UU No 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa mitigasi bencana yaitu suatu upaya yang dilakukan guna mengurangi resiko bencana bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dengan cara seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan sesuai. Mitigasi bencana melalui pendidikan dapat dilakukan melalui program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang berlandaskan hukum Peraturan Kepala BNPb nomor 4 tahun 2012 tentang

Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY telah merilis data tahun 2013-2018 dimana terdapat sebanyak 81 Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman (52 sekolah), Kulon Progo (7 sekolah), Gunungkidul (8 sekolah), Bantul (11 sekolah), dan Kota Yogyakarta (3 sekolah). Kota Yogyakarta memiliki 3 Sekolah Siaga Bencana (SSB) diantaranya SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Bangunrejo 2 yang sudah dikukuhkan sejak tahun 2015, serta SD Negeri Baluwarti mulai tahun 2016. Pemilihan ketiga sekolah tersebut sebagai Sekolah Siaga Bencana (SSB) dikarenakan SD Negeri Bangunrejo 1 dan 2 lokasinya saling berhadapan dan berada di dekat tebing Sungai Winongo dengan kedalaman belasan meter yang terus mengalami abrasi sehingga rentan terjadi bencana tanah longsor dan banjir. Sedangkan SD Negeri Baluwarti memiliki potensi bencana berupa angin ribut yang sering terjadi di Kotagede, selain itu saat bencana gempa bumi yang menimpa kota Yogyakarta tahun 2006 lalu lokasi tersebut mengalami kerusakan cukup parah karena berada diantara bangunan-bangunan padat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian evaluatif. Model evaluasi program yang digunakan yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang

dikembangkan oleh *Stufflebeam* (1976). Lokasi Penelitian di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 Kota Yogyakarta. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan salah satu software *CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software)* yaitu NVivo 12 plus.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini digambarkan berdasarkan model *CIPP (Context, Input, Process, Product)* seperti berikut;

a. Evaluasi *context* (konteks)

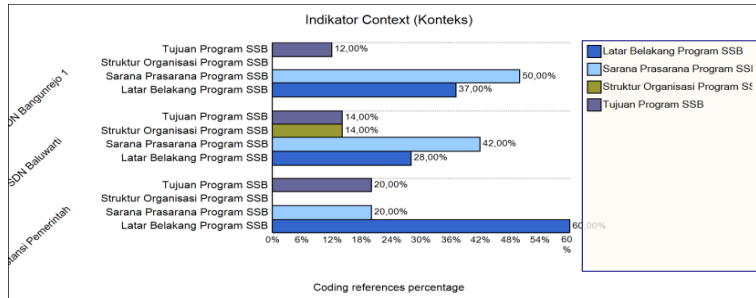
Tahap pertama dari evaluasi model *CIPP* adalah evaluasi konteks (*context*) berupa upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sample yang dilayani dan tujuan proyek (Arikunto, 2004). Sehingga pada indikator *context* (konteks) akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki program tersebut agar evaluator dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan.

Untuk itu dalam melakukan evaluasi *context* pada program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara mengetahui bagaimana latar belakang program SSB, tujuan diadakan program, struktur organisasi dalam pelaksanaan program, kemudian menganalisis dan mengungkapkan kebutuhan yang sudah maupun yang belum tercapai. Latar belakang program Sekolah Siaga Bencana (SSB) akan menunjukkan alasan kenapa sekolah tersebut dipilih sehingga memunculkan tujuan dari diadakan program tersebut. Apabila latar belakang dan tujuan program tidak dimiliki, maka sekolah tersebut tidak dapat dipilih untuk menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) atau bisa dikatakan sekolah tersebut tergolong aman terhadap resiko bencana.

Struktur organisasi akan menunjukkan siapa saja pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di masing-masing sekolah. Apabila sekolah terpilih tidak mempunyai struktur organisasi khusus, maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih wewenang. Sedangkan sarana prasarana akan menjadi fasilitas penunjang untuk menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), sehingga apabila tidak ada maka sekolah tersebut akan kesulitan dalam menjalankan program tersebut tanpa fasilitas mendukung yang memadai.

Tabel 1.1

Hasil Indikator Context (Konteks)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa SD Negeri Baluwarti dalam penerapan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta, sudah memenuhi latar belakang program, tujuan program, sarana prasarana, sampai struktur organisasi. Komponen sarana prasarana memiliki poin yang tinggi dibandingkan poin lainnya karena sebagai salah satu sekolah percontohan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta, SD Negeri Baluwarti diberikan fasilitas yang terbilang lengkap untuk digunakan saat simulasi bahkan untuk penunjang pembelajaran di kelas.

SD Negeri Bangunrejo 1 juga sudah memiliki latar belakang, tujuan, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di kawasan tersebut. Akan tetapi, SD Negeri Bangunrejo 1 belum memiliki struktur organisasi khusus terkait pelaksanaan program SSB. Bagian sarana prasarana di SD Negeri Bangunrejo 1 terbilang memadai, sehingga pada gambar menunjukkan nilai yang besar.

Instansi pemerintah disini ialah BPBD DIY selaku lembaga yang menangani program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang lebih fokus pada pembentukan konsep berupa latar belakang program, tujuan program, serta pemberian sarana prasarana pendukung bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut. Untuk struktur organisasi pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), pembentukannya diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.

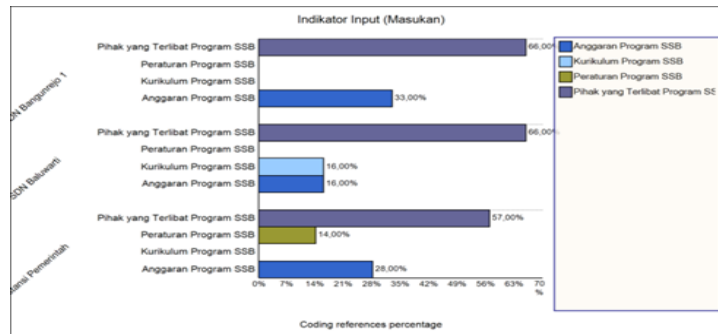
Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator context (konteks) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan baik dimana SD Negeri Baluwarti sudah memenuhi 4 (empat) indikator teori evaluasi *context* (konteks). Akan tetapi, SD Negeri Bangunrejo 1 ada satu yang belum terpenuhi yaitu struktur organisasi pengembangan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dikarenakan penerapannya lebih difokuskan pada pembelajaran di kelas.

b. Evaluasi *Input* (Masukan)

Tahap kedua dari evaluasi model CIPP adalah evaluasi masukan (*input*) yaitu kegiatan evaluasi yang membantu peneliti untuk mengatur keputusan, menentukan sumber alternatif yang akan digunakan, rencana, strategi, dan prosedur kerja untuk mencapai tujuan program dimana komponen evaluasi *input* meliputi sumber daya manusia, dana anggaran, dan peraturan yang diperlukan (Darodjat & Wahyudiana, 2015). Untuk itu dalam melakukan evaluasi *input* pada program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara mengetahui apa saja yang dapat mendukung program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta seperti pihak yang terlibat, anggaran, peraturan dalam menjalankan program, sampai kurikulum pembelajaran yang digunakan.

Adanya kurikulum pembelajaran khusus tentang pendidikan kebencanaan akan dijadikan sebagai panduan selama proses belajar mengajar di kelas agar *edukasi* kebencanaan yang disampaikan kepada para siswa dapat dilakukan secara sistematis dan jelas. Anggaran akan diperlukan untuk membiayai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Untuk peraturan khusus terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) akan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan program tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari awal. Sedangkan pihak yang terlibat akan menunjukkan bagaimana keterlibatan pihak baik internal maupun eksternal dalam mendukung dan menjalankan program tersebut. Sehingga pada indikator ini akan terlihat hal-hal yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah dasar Kota Yogyakarta.

Tabel 1.2
 Hasil Indikator *Input* (Masukan)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa SD Negeri Baluwarti sudah memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) bagian yang ada. Hal ini berarti bahwa SD Negeri Baluwarti sudah cukup baik dalam penerapan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Akan tetapi, SD Negeri Baluwarti tidak memiliki peraturan khusus dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah. Sedangkan untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dulu ketika peresmian ada dari puskesmas, polisi, limnas. Sekarang program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sifat mandiri jadi pihak yang dilibatkan hanya internal sekolah, walaupun ada ketika simulasi besar-besaran sekitar 2-3 tahun sekali baru melibatkan pihak eksternal. Terkait anggaran, SD Negeri Baluwarti menggunakan dana BOS dalam pelaksanaan program. Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) juga sudah dimasukkan dalam kurikulum maupun silabus pada mata pelajaran di kelas mulai dari kelas I-VI.

Sedangkan SD Negeri Bangunrejo 1 sudah memenuhi 2 (dua) dari 4 (empat) bagian penilaian yang ada, dimana pada peraturan khusus terkait pelaksanaan program dan kurikulum terkait program belum ada. Hal ini berarti bahwa SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikategorikan cukup dalam penerapan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Selama simulasi saat peresmian program Sekolah Siaga Bencana (SSB) tahun 2015 lalu banyak melibatkan pihak eksternal mulai dari polisi, limnas, dan puskesmas. Akan tetapi, setelah peresmian sudah tidak ada simulasi lagi sehingga pihak eksternal tidak dilibatkan kembali. Anggaran pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 dialokasikan dari dana BOS. Untuk peraturan dan kurikulum khusus terkait

pelaksanaan program belum ada, tetapi RPP (Rencana Pelaksana Pembelajaran) sudah ada. Pendidikan kebencanaan biasanya dikaitkan berdasarkan buku tema pembelajaran di kelas. Untuk kelas I dan II dikaitkan pada tema pembelajaran mengenai lingkungan, dampak bencana banjir, dan kebakaran hutan. Kelas IV sampai VI dikaitkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS.

Ada banyak instansi pemerintah selain BPBD DIY yang dilibatkan dalam program Sekolah Siaga Bencana (SSB) selama persiapan sampai peresmian diantaranya Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, TNI, Polisi, LSM, NGO, puskesmas, PMI, Dinas Kesehatan. Keterlibatan mereka disesuaikan dengan masing-masing tugasnya seperti Dinas Dikpora Kota Yogyakarta yang ditunjuk untuk membantu dalam penyusunan kurikulum pendidikan kebencanaan, TNI/Polisi terlibat dalam gladi dan simulasi kegiatan, LSM/NGO yang dilibatkan dalam penyusunan renkon, dan puskesmas/PMI/Dinas Kesehatan terlibat dalam pemberian Pelatihan PPGD (Pelatihan Pertama Pertolongan Gawat Darurat). mulai dari persiapan sampai peresmian (lauching). Terkait anggaran mulai dari persiapan sampai peresmian di danai keseluruhannya oleh BPBD DIY dalam bentuk sarana prasaran, konsumsi, transportasi, dan sebagainya. Beberapa peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) diantaranya Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator *input* (masukan) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan cukup, dilihat dari 4 (empat) bagian pembahasan yaitu pihak yang terlibat, kurikulum program, peraturan khusus terkait program, dan anggaran dalam pelaksanaan program. Akan tetapi, ada yang belum terpenuhi yaitu kurikulum dan peraturan khusus terkait program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1. Begitu pula dengan SD Negeri Baluwarti yang juga belum memiliki peraturan khusus terkait program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Sebaiknya sekolah SD Negeri Bangunrejo 1 segera membuat kurikulum dan peraturan khusus terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Begitupula dengan SD Negeri Baluwarti agar membuat peraturan

khusus tersebut agar lebih memudahkan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) kedepannya.

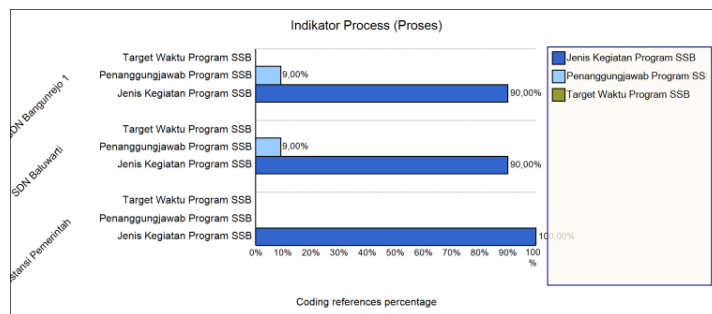
c. Evaluasi *Process* (Proses)

Tahap ketiga dari evaluasi model CIPP adalah evaluasi *process* (Proses) untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang sudah terlaksana sesuai dengan rencana serta mengontrol apakah suatu program telah memberikan umpan balik (Arikunto & Jabar, 2014). Untuk itu, maka dalam melakukan evaluasi process pada program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara mengetahui kegiatan apa yang dilakukan dalam program, siapa orang yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan akan selesai agar dapat diketahui sejauh mana program Sekolah Siaga Bencana (SSB) berjalan di Kota Yogyakarta.

Jenis kegiatan akan menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sesuai dengan yang direncanakan pada awal proses pembentukan program. Untuk penanggung jawab program yang juga akan berperan sebagai pemimpin dalam menjalankan setiap kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Sedangkan target waktu pelaksanaan program akan digunakan sebagai acuan perhitungan waktu dari awal program SSB tersebut dibentuk sampai selesai pelaksanaan program.

Tabel 1.3

Hasil Indikator *Process* (Proses)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Berdasarkan gambar di atas, SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 sama-sama memperoleh nilai yang sama. Jenis kegiatan pun sama, mulai persiapan sampai peresmian dari simulasi sampai pembelajaran di kelas bahkan tahun 2018 Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) jurusan PGSD pernah mengadakan program

yang mengajak guru-guru pengajar di sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) untuk menulis buku cerita menarik tentang kebencanaan. Hal ini dilakukan untuk membuat anak-anak lebih memahami secara sederhana terkait penanganan ketika terjadi bencana. Kegiatan tersebut dilakukan di SDN Baluwarti dimana buku karya tersebut dicetak dan dibagikan ke sekolah-sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dengan disesuaikan potensi bencananya.

Akan tetapi untuk simulasi kegiatan, SD Negeri Bangunrejo 1 tidak se-aktif SD Negeri Baluwarti yang melakukannya setahun sekali. Penanggungjawab pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 dipegang langsung oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab program. BPBD DIY sendiri menjelaskan proses pembentuk program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 yang diawali dari sosialisasi selama 2 hari dimana dikumpulkan guru-guru, komite, dan masyarakat sekitar untuk mengikuti sosialisasi tentang kerentanan yang ada di sekolah termasuk apa saja yang perlu disiapkan. Selanjutnya, Bimbingan Teknis (BimTek) pertama yaitu penyusun Renkon (Rencana Kondensi) yang mensinergikan 3 unsur (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dengan guru dan komite dimana sasaran utama orang tua karena anak-anak merupakan kelompok rentan bencana. Penyusun Renkon bertujuan untuk melatih guru dan masyarakat sekitar untuk bisa membuat rencana dalam menghadapi bencana dimana hasilnya berupa dokumen yang memaparkan siapa saja yang terlibat, apa yang harus dilakukan, sarana prasarana, dimana, dan bagaimana caranya menghadapi bencana.

Ketika bencana terjadi maka Renkon akan menjadi Renop (Rencana Operasi) sehingga tidak kebingungan dalam menghadapi bencana maupun tumpang tindih tanggungjawab dan juga mengkaji resiko yang ada serta bagaimana menekan resiko, kendala, serta sumber daya yang dimiliki. Hasilnya bisa berupa peta evakuasi, sarana prasarana yang dimiliki, dan tim siaga bencana sekolah. Ada indeks penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan materi-materi penanggulangan resiko bencana, hasilnya yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) atau Silabus yang memuat pengarusutamaan bencana sehingga bisa timbul budaya siaga bencana. Renkon yang telah disusun sebelumnya dibuat scenario kemudian

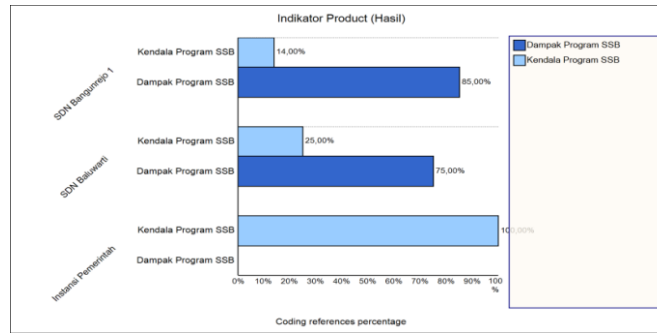
terakhir akan diadakan gladi dan simulasi. Skenario simulasi perlu dilakukan berulang-ulang, sampai kemudian di diresmikan (*launching*) menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator *input* (masukan) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan sudah baik jika dilihat dari 3 (tiga) bagian pembahasan yaitu target waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksanaan program, dan jenis kegiatan. SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 sama-sama sudah memenuhi 2 (dua) bagian pembahasan yaitu penanggungjawab pelaksanaan program dan jenis kegiatan. Akan tetapi target waktu pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 belum terpenuhi karena memang BPBD DIY menginginkan program tersebut bersifat *continue* (berkelanjutan) dengan dilakukan mandiri oleh masing-masing sekolah sehingga tidak memiliki target waktu kapan akan selesai atau dihentikan. Mengingat program ini sangat memberikan dampak positif bagi pengetahuan siswa terutama tentang kesiapsiagaan bencana.

d. Evaluasi *Product* (Hasil)

Tahap keempat dari evaluasi model CIPP adalah evaluasi *product* (hasil) berupa penilaian yang dilakukan guna mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil evaluasi akan sangat menentukan apakah program masih harus diteruskan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan (Darodjat & Wahyudiana, 2015). Untuk itu, evaluasi hasil yang akan diperoleh dari program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta adalah menilai keberhasilan program dalam meraih pencapaian yang telah dirancang dan melihat dampak yang terjadi sebagai bukti adanya proses berjalannya program sampai pada menghasilkan sebuah kebijakan baru apakah program ini perlu ditingkatkan dengan cara baru agar lebih efektif.

Tabel 1.4
 Hasil Indikator *Product* (Hasil)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Berdasarkan gambar di atas, dampak yang dirasakan oleh warga lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar sekolah terhadap adanya pelaksanaan program Sekolah Siaga Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 berada pada nilai di atas 70% yang berarti memuaskan. Hal ini menandakan bahwa program Sekolah Siaga Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dinilai efektif dalam rangka meningkatkan pendidikan kebencanaan warga lingkungan sekolah SD Negeri Baluwarti maupun SD Negeri Bangunrejo 1. Walaupun ada beberapa kendala yang harus diperbaiki oleh SD Negeri Baluwarti, SD Negeri Bangunrejo 1, dan BPBD DIY.

SD Negeri Baluwarti memiliki beberapa kendala seperti perubahan Petunjuk Teknis (juknis) anggaran dana BOS yang akan berdampak pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan SSB, kekhawatiran akan kesiapan metal para siswa ketika nanti terjadi bencana yang sesungguhnya, serta padatnya kegiatan sekolah yang menyulitkan para guru mencari waktu untuk melaksanakan program. Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh SD Negeri Bangunrejo 1 lebih kepada keterbatasan waktu dimana SD Negeri Bangunrejo 1 harus berbagi tempat dengan SD Negeri Bangunrejo 2 yang masih dalam tahap renovasi sehingga setiap mata pembelajaran dikurangi waktunya 10 menit. Sedangkan BPBD DIY kendalanya lebih kepada kurang koordinasinya dengan pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia, dan masalah kesadaran masyarakat akan bencana yang masih rendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator *product* (hasil) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 dari segi dampak yang ditimbulkan bisa dikatakan sangat baik dan berhasil

sesuai tujuan program. Hal ini dikarenakan dampak yang di dapat oleh sasaran program seperti para murid, orang tua, dan warga sekitar lingkungan sekolah sangat positif. Mereka merasa bahwa pendidikan kebencanaan melalui program Sekolah Siaga Bencana (SSB) mampu meningkatkan sikap siaga para murid dalam menghadapi bencana terutama untuk anak-anak yang terkenal rentan menjadi korban jika bencana alam terjadi. Akan tetapi dari segi kendala juga banyak hal yang harus diperbaiki dimana kendala yang dirasakan oleh SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti secara keseluruhan yaitu anggaran dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB).

4. Penutup

a. Kesimpulan

Mengikuti prosedur CIPP model dari Stufflebeam (1976), bahwa evaluasi ini secara tetap berorientasi pada beberapa indikator antara lain yaitu Context (Konteks), Input (Masukan), Process (Process), dan Product (Hasil) dengan kesimpulan bahwa secara garis besar dari evaluasi *context* (konteks) menunjukkan bahwa program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dengan studi kasus di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan berjalan dengan baik pada indikator ini. Pada evaluasi *input* menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan cukup. Pada evaluasi *process* menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan baik. Sedangkan pada evaluasi *product* menunjukkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan sangat baik.

b. Saran

Ada beberapa saran yang penulis berikan yaitu SD Negeri Bangunrejo 1 agar segera membuat struktur organisasi dan kurikulum khusus dalam pengembangan dan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah walaupun belum mengadakan simulasi kembali. Sedangkan SD Negeri Baluwarti diharapkan agar terus mengembangkan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) walaupun belum memiliki peraturan khusus terkait pelaksanaan tersebut. Untuk BPBD DIY diharapkan agar kedepannya lebih sering lagi mengadakan simulasi kebencanaan lanjutan sehingga tidak hanya saat simulasi menjelang peresmian saja. Selain itu juga mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) lebih lanjut lagi

terutama untuk mendanai simulasi kegiatan agar pihak sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) tersebut lebih lancar tanpa kendala dana. Perlu adanya komunikasi lebih mendalam dengan pihak-pihak terlibat di luar BPBD DIY agar pelaksanaan program ini tidak tumbang tindih.

Referensi

- Arikunto, Suharsimi & Safruddin Abdul Jabbar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indonesia, K. P. B., & Jakarta, M. (2011). Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana. Jakarta: <http://gerashiaga.files.wordpress.com/2012/06/buku-kerangka-kerjasekolah-siaga-bencana.pdf>.
- Darodjat, & Wahyudiana. (2015). *Model Evaluasi Program*. Islamadina, Volume XIV, 1-28
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1).
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Dikutip dari <https://bpbd.jogjakota.go.id/> (Diakses pada 16 Desember 2019, pukul 10.00 WIB).
- DIBI, BNPB. *Data Kebencanaan di Indonesia*. Dikutip dari <http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana>. (Diakses pada tanggal 7 September 2019, pukul 17.00 WIB).
- Geoportal Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Daftar Sekolah Siaga Bencana di DIY*. Dikutip dari <http://gis.jogjaprovo.go.id/documents/200>. (Diakses pada 07 Oktober 2019, pukul 22.00 WIB).
- KRJogja.com. *12 Potensi Bencana Mengintai DIY*. Februari, 2019. Dikutip dari https://krjogja.com/web/news/read/91898/12_Potensi_Bencana_Mengintai_DIY. (Diakses pada 07 Oktober 2019, pukul 15.00 WIB).
- RadarJogja.com. *Jenjang SD Jadi Sasaran Mitigasi Bencana*. Dikutip dari <https://radarjogja.jawapos.com/2016/04/07/jenjang-sd-jadi-sasaran-mitigasi-bencana/>. (Diakses pada 12 Oktober 2019, pukul 09.00 WIB).

Republika.com. *Yogyakarta Kukuhkan Dua Sekolah Siaga Bencana*. Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/15/06/04/npewh0-yogyakarta-kukuhkan-dua-sekolah-siaga-bencana>. (Diakses pada 12 Oktober 2019, pukul 09.00 WIB).

Solopos.com. *Mitigasi Bencana : SDN Bangunrejo Jadi Sekolah Siaga Bencana*. Dikutip dari <https://www.solopos.com/mitigasi-bencana-sdn-bangunrejo-jadi-sekolah-siaga-bencana-578807>. (Diakses pada 10 Desember 2019, pukul 20.00 WIB).

TribunJogja.com. *SD Baluwarti Jadi Sekolah Siaga*. Dikutip dari <https://jogja.tribunnews.com/2016/04/06/sd-baluwarti-jadi-sekolah-siaga-bencana>. (Diakses pada 07 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB).

Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana Universitas Pendidikan Indonesia. (2010). *Sekolah Siaga Bencana*. Dikutip dari http://p2mb.geografi.upi.edu/Sekolah_Siaga.html. (Diakses pada 21 September 2019).

Portal Pemerintah Kota Yogyakarta. *Geografis Kota Yogyakarta*. Dikutip dari <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>. Diakses pada 15 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana.

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana

Laporan Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan SSB BPBD DIY tahun 2015.